



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota setiap triwulan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 September 2025

  
WALIKOTA DENPASAR,  
  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 September 2025

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,  
  
IDA BAGUS ALIT WIRADANA  
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

1. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
2. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
3. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2026
4. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
5. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
6. RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
7. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
9. RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2026
10. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
11. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
12. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
13. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
14. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
15. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026
16. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
17. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2026
18. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
19. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
20. RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
21. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
22. RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
23. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
24. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
25. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2026

26. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
27. RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
28. RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
29. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
30. RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
31. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
32. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
33. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2026
34. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
35. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
36. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,  
  
GUSRI NGURAH JAYA NEGARA

A decorative graphic consisting of three purple lines and three purple circles. One line starts from the top left and goes diagonally down to the right, ending at a large purple circle. Another line starts from the top center and goes diagonally down to the right, ending at a medium purple circle. A third line starts from the top right and goes diagonally down to the left, ending at a large purple circle. The circles have a slight 3D effect with a darker purple shadow on the right side.

# **RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2026**

**KECAMATAN DENPASAR UTARA  
TAHUN 2025**

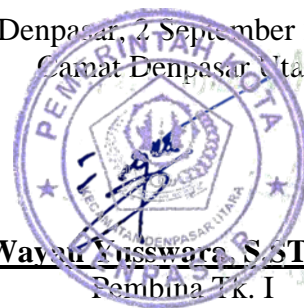
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Utara menyusun Rencana Akhir Kerja Perangkat Daerah (Ranhir Renja PD) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Denpasar, 2 September 2025  
Camat Denpasar Utara



**I Wayan Yusswara, S.STP.M.Si**  
Pembina Tk. I

NIP. 19770730 199802 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Denpasar Utara	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3. Program dan Kegiatan.	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	47
BAB V PENUTUP	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024	6
Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Utara	12
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Denpasar Utara	16
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026	27
Tabel 3.1. Program/Kegiatan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 dan Proyeksi Program/Kegiatan Tahun 2027	38
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2026	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam kewenangannya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah, dalam hal ini Rencana Pembangunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas Renstra ( Rencana Strategis ) Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi :

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika pembangunan daerah dan nasional.

### **1.2. Landasan Hukum**

Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465),
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Denpasar Utara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi umum pembangunan kecamatan Denpasar utara,
- b. Menyediakan informasi mengenai potensi/kemampuan keuangan kecamatan Denpasar utara selama satu tahun kedepan,
- c. Menyediakan informasi dan analisis permasalahan serta isu strategis kecamatan Denpasar utara,
- d. Sebagai pedoman dan arah pembangunan Kecamatan Denpasar Utara selama satu tahun mendatang.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

#### **BAB 1   Pendahuluan**

- 1.1   Latar Belakang
- 1.2   Landasan Hukum
- 1.3   Maksud dan Tujuan
- 1.4   Sistematika Penulisan

#### **BAB 2   Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD
- 2.2   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3   Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4   Review terhadap Rancangan RKPD

#### **BAB 3   Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1   Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2   Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3   Program dan Kegiatan

#### **BAB 4   Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

#### **BAB 5   Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara**

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Kecamatan Denpasar Utara mempunyai prioritas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Keterkaitan dengan pelayanan, Kecamatan Denpasar Utara selalu memberdayakan masyarakat Kecamatan Denpasar Utara dengan tujuan agar segala aktifitas yang berjalan di Wilayah Kecamatan Denpasar Utara lebih baik dan lebih maju. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1. Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>22.209.688.288</b>	<b>17.810.750.384</b>	<b>19.984.653.001</b>	<b>17.810.750.384</b>	<b>89%</b>	<b>22.209.688.288</b>	<b>21.320.873.288</b>	<b>96%</b>
1.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>15.989.895.400</b>	<b>11.110.826.871</b>	<b>12.623.059.077</b>	<b>11.110.826.871</b>	<b>88%</b>	<b>15.989.895.400</b>	<b>15.989.895.400</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15.989.895.400	11.110.826.871	12.623.059.077	11.110.826.871	88%	15.989.895.400	15.989.895.400	100%
1.2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.021.490.000</b>	<b>1.499.726.400</b>	<b>1.640.397.300</b>	<b>1.499.726.400</b>	<b>91%</b>	<b>1.021.490.000</b>	<b>1.021.490.000</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	27.668.000	19.854.000	20.276.000	19.854.000	98%	27.668.000	27.668.000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	742.199.000	1.316.863.500	1.442.835.300	1.316.863.500	91%	742.199.000	742.199.000	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	106.160.000	45.837.000	50.299.000	45.837.000	91%	106.160.000	106.160.000	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	126.983.000	93.923.900	103.449.000	93.923.900	91%	126.983.000	126.983.000	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	18.480.000	23.248.000	23.538.000	23.248.000	99%	18.480.000	18.480.000	100%
1.3	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>537.160.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>537.160.000</b>	<b>537.160.000</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	537.160.000	-	-	-	0%	537.160.000	537.160.000	100%
1.4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.804.588.888</b>	<b>4.827.838.013</b>	<b>5.220.975.624</b>	<b>4.827.838.013</b>	<b>92%</b>	<b>3.804.588.888</b>	<b>3.804.588.888</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	481.200.000	298.614.764	370.283.000	298.614.764	81%	481.200.000	481.200.000	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	22.966.000	33.758.000	22.966.000	68%	-	-	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3.323.388.888	4.506.257.249	4.816.934.624	4.506.257.249	94%	3.323.388.888	3.323.388.888	100%

	1.5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>856.554.000</b>	<b>372.359.100</b>	<b>500.221.000</b>	<b>372.359.100</b>	<b>74%</b>	<b>856.554.000</b>	<b>504.899.000</b>	<b>59%</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	504.899.000	372.359.100	500.221.000	372.359.100	74%	504.899.000	504.899.000	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	351.655.000	260.058.212	336.000.000	260.058.212	77%	351.655.000	351.655.000	100%
	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>446.864.000</b>	<b>368.997.112</b>	<b>389.819.000</b>	<b>368.997.112</b>	<b>95%</b>	<b>446.864.000</b>	<b>446.864.000</b>	<b>100%</b>
	2.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi</b>	<b>417.774.000</b>	<b>327.547.112</b>	<b>347.969.000</b>	<b>327.547.112</b>	<b>94%</b>	<b>417.774.000</b>	<b>417.774.000</b>	<b>100%</b>
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	207.843.000	287.897.112	308.319.000	287.897.112	93%	207.843.000	207.843.000	100%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	209.931.000	39.650.000	39.650.000	39.650.000	100%	209.931.000	209.931.000	100%
	2.2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di tingkat kecamatan</b>	<b>29.090.000</b>	<b>41.450.000</b>	<b>41.850.000</b>	<b>41.450.000</b>	<b>99%</b>	<b>41.850.000</b>	<b>29.090.000</b>	<b>100%</b>
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	29.090.000	41.450.000	41.850.000	41.450.000	99%	41.850.000	29.090.000	100%
	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>3.917.478.500</b>	<b>2.417.586.238</b>	<b>2.615.786.488</b>	<b>2.417.586.238</b>	<b>92%</b>	<b>3.917.478.500</b>	<b>3.917.478.500</b>	<b>100%</b>
	3.1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>3.917.478.500</b>	<b>2.417.586.238</b>	<b>2.615.786.488</b>	<b>2.417.586.238</b>	<b>92%</b>	<b>3.917.478.500</b>	<b>3.917.478.500</b>	<b>100%</b>
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	4.750.000	1.492.813.800	1.600.016.000	1.492.813.800	93%	4.750.000	4.750.000	100%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1.478.789.000	4.132.000	4.156.000	4.132.000	99%	1.478.789.000	1.478.789.000	100%
		Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2.433.939.500	920.640.438	1.011.614.488	920.640.438	91%	2.433.939.500	2.433.939.500	100%
	4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>709.270.000</b>	<b>1.045.128.000</b>	<b>1.051.344.000</b>	<b>1.045.128.000</b>	<b>99%</b>	<b>709.270.000</b>	<b>709.270.000</b>	<b>100%</b>
	4.1	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</b>	<b>709.270.000</b>	<b>1.045.128.000</b>	<b>1.051.344.000</b>	<b>1.045.128.000</b>	<b>99%</b>	<b>709.270.000</b>	<b>709.270.000</b>	<b>100%</b>
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	709.270.000	1.045.128.000	1.051.344.000	1.045.128.000	99%	709.270.000	709.270.000	100%

		<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan</b>	<b>205.694.000</b>	<b>722.990.400</b>	<b>965.481.200</b>	<b>722.990.400</b>	<b>0%</b>	<b>205.694.000</b>	<b>205.694.000</b>	<b>100%</b>
		<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>205.694.000</b>	<b>722.990.400</b>	<b>965.481.200</b>	<b>722.990.400</b>	<b>100%</b>	<b>205.694.000</b>	<b>72.271.000</b>	<b>35%</b>
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	172.619.000	690.665.400	929.856.200	690.665.400	74%	172.619.000	172.619.000	100%
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.075.000	32.325.000	35.625.000	32.325.000	91%	33.075.000	33.075.000	100%
		<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>39.196.000</b>	<b>24.984.000</b>	<b>25.734.000</b>	<b>24.984.000</b>	<b>97%</b>	<b>39.196.000</b>	<b>39.196.000</b>	<b>100%</b>
		<b>6.1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>39.196.000</b>	<b>24.984.000</b>	<b>25.734.000</b>	<b>24.984.000</b>	<b>97%</b>	<b>39.196.000</b>	<b>39.196.000</b>	<b>100%</b>
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	39.196.000	24.984.000	25.734.000	24.984.000	97%	39.196.000	39.196.000	100%

Penjelasan dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara tahun 2024 diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target 100% terealisasi 88,02%;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik target 100% terealisasi 80,65%;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 100% terealisasi 68.03%;
  - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenadaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 100% terealisasi 74,44%;
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target 100% terealisasi 77,40%;
  - f. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia target 100% terealisasi 70,87%;
  - g. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia target 100% terealisasi 74,28%.
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target 100% terealisasi 97,92%;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 100% terealisasi 96,25%;
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga target 100% terealisasi 91,13%;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan target 100% terealisasi 90,97%;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan target 100% terealisasi 98,77%;
  - f. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target 100% terealisasi 93,55%;
  - g. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait target 100% terealisasi 93,38%;

- h. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan target 100% terealisasi 100%;
  - i. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha target 100% terealisasi 99,04%;
  - j. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan target 100% terealisasi 99,42%;
  - k. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan target 100% terealisasi 90,74%;
  - l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan target 100% realisasi 93,30%;
  - m. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan target 100% terealisasi 90,74%;
  - n. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa target 100% terealisasi 97,09%.
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak diketemukan program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai dengan bulan Desember 2024;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/hasil adalah sebagai berikut :
- a. Masih minimnya pengembangan kompetensi aparatur yang sesuai dengan kebutuhan,
  - b. Adanya pelimpahan kegiatan dan anggaran dari instansi lain pada semester II tahun berjalan yang membutuhkan regulasi sehingga terjadi pembengkakan anggaran pada akhir tahun yang berimbas kepada serapan anggaran,
  - c. Adanya ketentuan penggunaan produk dalam negeri dimana belum semua barang produk dalam negeri memiliki sertifikasi, disamping masih ada barang produk dalam negeri yang belum sesuai dengan spesifikasi kebutuhan,
  - d. Adanya beberapa belanja yang tidak bisa direalisasikan karena salah penempatan kode anggaran belanja,
  - e. Efisiensi/Recofusing anggaran pada tahun berjalan yang mana hal ini berimbas terhadap perubahan anggaran kas sehingga terjadinya pengurangan anggaran atau kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara adalah sebagai berikut:
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Denpasar Utara pada umumnya,

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Denpasar Utara.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Pematangan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran dari PD terkait untuk Perangkat Daerah Kecamatan,
  - b. Perlu adanya koordinasi kepada PD terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah kecamatan Denpasar utara dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Utara

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2023	2024	2025	2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>86%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>86%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63 orang/bulan	63 orang/bulan	63 orang/bulan	63 orang/bulan	60orang/bulan	63 orang/bulan	63 orang/bulan	101 orang/bulan	
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	97%	98%	90%	90%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	78%	91%	90%	90%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	100%	100%	100%	79%	91%	90%	90%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	82%	91%	90%	90%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	83%	99%	90%	90%	
<b>1.3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	100%	100%	100%	97%	0%	90%	90%	
<b>1.4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	100%	100%	100%	64%	90%	90%	90%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	85%	90%	90%	90%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	82%	90%	90%	90%	
<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	100%	100%	100%	67%	90%	90%	90%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	0%	#REF!	90%	90%	

2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara</b>	100%	100%	100%	100%	78%	90%	90%	90%	
2.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</b>	83,00	93,00	93,16	93,20	93,00	93,16	93,16	93,20	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	83,00	93,00	93,16	93,20	93,00	93,16	93,16	93,20	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	93%	80%	80%	
2.2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di tingkat kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	83,00	93,00	93,16	93,20	93,00	93,16	93,16	93,20	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	83,00	93,00	93,16	93,20	93,00	93,16	93,16	93,20	
3.1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	100%	100%	100%	100%	70%	80%	80%	80%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	100%	100%	100%	100%	70%	80%	80%	80%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	100%	100%	100%	100%	53%	80%	80%	80%	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	100%	100%	100%	58%	80%	85%	85%	
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	100%	100%	100%	37%	80%	85%	85%	
4.1	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</b>	100%	100%	100%	100%	78%	80%	85%	85%	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	100%	100%	100%	100%	78%	80%	85%	85%	

5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%	78%	80%	85%	85%	
5.1	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>	<b>95%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>	<b>95%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	7%	80%	85%	85%	
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan</b>	100%	100%	100%	100%	80%	91%	85%	85%	
6.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	<b>8 desa</b>	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pertimbangan atas informasi yang tersirat dalam arah kebijakan di tingkat nasional, regional, dan juga dalam visi, misi, serta program kepala daerah terpilih merupakan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk merumuskan isu strategis pembangunan 5 Tahun ke depan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Denpasar Utara sebagai berikut :

#### ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”***

### 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Denpasar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Denpasar Utara

No.	Rencana Kerja Tahun 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Kantor Camat</b>										
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>15.759.477.278</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 17.943.034.136</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>100%</b>	<b>13.407.556.688</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 15.989.895.400</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63orang/bulan	13.407.556.688	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 orang/bulan	Rp 15.989.895.400	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>385.176.650</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 315.757.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	9.368.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 10.734.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	296.752.650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 231.090.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	25.689.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 25.188.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	41.091.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 41.353.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	12.276.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp 7.392.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>300.400.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 179.903.000</b>	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 laporan	300.400.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 179.903.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.269.905.940</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.013.088.736</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	300.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 248.400.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Rp -	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	969.505.940	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 764.688.736	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>396.438.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 444.390.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 unit	197.818.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 unit	Rp 250.014.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	198.620.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	10 unit	Rp 194.376.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>93,16</b>	<b>257.053.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>93,20</b>	<b>Rp 446.864.000</b>	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</b>	<b>100%</b>	<b>225.295.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 417.774.000</b>	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 laporan	61.815.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 laporan	Rp 207.843.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dokumen	163.480.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dokumen	Rp 209.931.000	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di tingkat kecamatan</b>	<b>93,16</b>	<b>31.758.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di tingkat kecamatan</b>	<b>93,20</b>	<b>Rp 29.090.000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 dokumen	31.758.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 dokumen	Rp 29.090.000	

<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	83.145.000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Denpasar Utara	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 45.308.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	83.145.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 45.308.000	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	1 laporan	83.145.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 45.308.000	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	177.075.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	Rp 205.694.000	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala	100%	177.075.000	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp 205.694.000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	147.375.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	Rp 172.619.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	29.700.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 dokumen	Rp 33.075.000	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	32.200.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase pembinaan dan pengawasan	100%	Rp 39.196.000	
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	32.200.000	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	Rp 39.196.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	32.200.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	Rp 39.196.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp -	

Kelurahan Tonja											
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>1.409.956.050</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>552.045.000</b>	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>241.197.050</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>196.198.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 paket	4.660.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp	6.815.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	195.880.050	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp	147.138.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 paket	17.621.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp	21.547.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	19.076.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp	17.002.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	1 dokumen	3.960.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp	3.696.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>149.050.000</b>	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	Rp	149.050.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.050.833.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>969.945.640</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	113.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp	121.800.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	937.033.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp	848.145.640	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>117.926.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>128.357.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	65.876.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	Rp	78.182.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	52.050.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp	50.175.000	

	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.064.987.684</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.220.060.000</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>1.064.987.684</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.220.060.000</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	1.506.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.485.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	471.740.842	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.506.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 unit	Rp 460.000.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 Pokmas/Ormas	591.740.842	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 Pokmas/Ormas	Rp 758.575.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>234.391.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 218.404.000</b>	
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>234.391.000</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 218.404.000</b>	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	234.391.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 218.404.000	

Kelurahan Ubung										
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>1.212.499.320</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.162.724.064</b>	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>250.895.900</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 146.503.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 paket	3.553.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 3.589.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	192.950.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 101.156.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 paket	33.253.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 23.271.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	17.179.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 14.791.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	1 dokumen	3.960.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 3.696.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 117.657.000</b>	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	Rp 117.657.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>801.198.420</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 716.240.064</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	36.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 39.600.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp -	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	765.198.420	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 676.640.064	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>160.405.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 182.324.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	102.435.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	Rp 105.430.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 unit	57.970.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1 unit	Rp 76.894.000	

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>936.285.100</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.066.654.000</b>	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>		<b>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>936.285.100</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.066.654.000</b>	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	3.100.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.290.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	20 unit	554.309.100	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20 unit	Rp 593.789.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 Pokmas/Ormas	378.876.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 Pokmas/Ormas	Rp 471.575.000	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>281.186.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 244.392.000</b>	
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>281.186.000</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 244.392.000</b>	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	281.186.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 244.392.000	

Kelurahan Peguyangan										
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>1.690.084.020</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.660.379.448</b>	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>349.391.600</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 363.032.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 paket	6.960.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 6.530.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	246.638.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 262.815.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 paket	41.472.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 36.154.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	49.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 53.837.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	1 dokumen	4.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 3.696.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 90.550.000</b>	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	Rp 90.550.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.237.666.420</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.105.314.448</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	63.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 71.400.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp -	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1.174.666.420	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 1.033.914.448	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>103.026.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 101.483.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 unit	66.156.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 unit	Rp 71.273.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	36.870.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	Rp 30.210.000	

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.675.281.500</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.630.764.500</b>	
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.630.764.500</b>	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Pokmas/Ormas	1.950.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.975.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	239.591.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Rp 425.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20 unit	1.433.740.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 Pokmas/Ormas	Rp 1.203.789.500	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>249.470.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 201.166.000</b>	
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>249.470.000</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 201.166.000</b>	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	249.470.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 201.166.000	

## 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan para pemangku kepentingan perangkat daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Kantor Camat</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>			
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>Rp 17.943.034.136</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>Rp 15.989.895.400</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15.989.895.400	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 315.757.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp 10.734.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp 231.090.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Rp 25.188.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Rp 41.353.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Rp 7.392.000	
	<b>Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Rp 179.903.000</b>	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp 179.903.000	

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.013.088.736</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp	248.400.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rp	764.688.736	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>444.390.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Rp	250.014.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Rp	194.376.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>Rp</b>	<b>446.864.000</b>	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</b>	<b>Rp</b>	<b>417.774.000</b>	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Rp	207.843.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp	209.931.000	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di tingkat kecamatan</b>	<b>Rp</b>	<b>29.090.000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Rp	29.090.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Rp</b>	<b>45.308.000</b>	
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Rp</b>	<b>45.308.000</b>	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp	45.308.000	

	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan</b>	Rp	<b>205.694.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum</b>	Rp	<b>205.694.000</b>	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila. pelaksanaan Undang-	Rp	172.619.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Rp	33.075.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan</b>	Rp	<b>39.196.000</b>	
	<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>		<b>Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Rp	<b>39.196.000</b>	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Rp	39.196.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp	-	
	<b>Kelurahan Tonja</b>					
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	Rp	<b>552.045.000</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	Rp	<b>196.198.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp	6.815.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	147.138.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Rp	21.547.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Rp	17.002.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp	3.696.000	
	<b>Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>149.050.000</b>	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Rp	149.050.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>969.945.640</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp	121.800.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rp	848.145.640	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>128.357.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Rp	78.182.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Rp	50.175.000	

	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.220.060.000</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.220.060.000</b>	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp	1.485.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp	460.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Rp	758.575.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Rp</b>	<b>218.404.000</b>	
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Rp</b>	<b>218.404.000</b>	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp	218.404.000	
	<b>Kelurahan Ubung</b>					
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.162.724.064</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Rp</b>	<b>146.503.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp	3.589.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	101.156.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Rp	23.271.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Rp	14.791.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp	3.696.000	
	<b>Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>117.657.000</b>	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Rp	117.657.000	

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>716.240.064</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp	39.600.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rp	676.640.064	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>182.324.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Rp	105.430.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Rp	76.894.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.066.654.000</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>		<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.066.654.000</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp	1.290.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Rp	593.789.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp	471.575.000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Rp</b>	<b>244.392.000</b>	
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Rp</b>	<b>244.392.000</b>	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Rp	244.392.000	

	Kelurahan Peguyangan				
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.660.379.448</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Rp</b>	<b>363.032.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp	6.530.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	262.815.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Rp	36.154.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Rp	53.837.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp	3.696.000
	<b>Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</b>		<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>90.550.000</b>
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Rp	90.550.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.105.314.448</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp	71.400.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rp	1.033.914.448
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>101.483.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Rp	71.273.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Rp	30.210.000

	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa /Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.630.764.500</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.630.764.500</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp	1.975.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Rp	425.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp	1.203.789.500	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Rp</b>	<b>201.166.000</b>	
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Rp</b>	<b>201.166.000</b>	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp	201.166.000	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target/capaian kinerja atas janji dan visi misi Pemerintah Kota Denpasar, berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Denpasar Utara sebagai perangkat daerah Kota Denpasar memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”***

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	80,00 (Baik)	83,00 (Baik)	93,00 (Baik)	93,16 (Baik)	93,20 (Baik)
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa

### 3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah kecamatan Denpasar Utara ditempuh melalui 5 (lima) strategi sesuai tupoksi antara lain :
  - a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
  - b. Meningkatkan Pemberdayaan di Masyarakat;
  - c. Meningkatkan Pengendalian Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- d. Meningkatkan Koordinasi Kewenangan Pemerintah di Kecamatan Denpasar Utara;
  - e. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa.
- b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara meliputi :
- Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara berjumlah 6 program, 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan,
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari 3 Wilayah Kelurahan dan 8 Wilayah Desa Administratif.
- c. Tabel rencana program/kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 serta proyeksi program/kegiatan tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1. Program/Kegiatan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 serta Proyeksi Program/Kegiatan Tahun 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju (Tahun 2027)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Bahan / Pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Camat								
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 17.943.034.136</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 19.737.337.550</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 15.989.895.400</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 17.588.884.940</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		101 orang/bulan	Rp 15.989.895.400			101 orang/bulan	Rp 17.588.884.940
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 315.757.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 347.332.700</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	Rp 10.734.000			1 Paket	Rp 11.807.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	Rp 231.090.000			1 Paket	Rp 254.199.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 Paket	Rp 25.188.000			1 Paket	Rp 27.706.800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 Paket	Rp 41.353.000			1 Paket	Rp 45.488.300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		1 Dokumen	Rp 7.392.000			1 Dokumen	Rp 8.131.200

		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 179.903.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 197.893.300</b>
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 179.903.000			1 laporan	Rp 197.893.300
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.013.088.736</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.114.397.610</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 248.400.000			1 laporan	Rp 273.240.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Rp -			1 laporan	Rp -
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 764.688.736			1 laporan	Rp 841.157.610
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 444.390.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 488.829.000</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 unit	Rp 250.014.000			17 unit	Rp 275.015.400
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	10 unit	Rp 194.376.000			10 unit	Rp 213.813.600
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara</b>	<b>93,20</b>	<b>Rp 446.864.000</b>			<b>93,20</b>	<b>Rp 491.550.400</b>
		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 417.774.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 459.551.400</b>
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 laporan	Rp 207.843.000			100 laporan	Rp 228.627.300
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dokumen	Rp 209.931.000			1 dokumen	Rp 230.924.100

		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di tingkat kecamatan</b>		93,20	Rp	29.090.000			93,24	Rp	31.999.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan		1 dokumen	Rp	29.090.000			1 dokumen	Rp	31.999.000
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum</b>		100%	Rp	45.308.000			100%	Rp	49.838.800
		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>		100%	Rp	45.308.000			100%	Rp	49.838.800
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 laporan	Rp	45.308.000			1 laporan	Rp	49.838.800
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan</b>		100%	Rp	205.694.000			100%	Rp	226.263.400
		<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum</b>		100%	Rp	205.694.000			100%	Rp	226.263.400
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50 orang	Rp	172.619.000			50 orang	Rp	189.880.900
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan		1 dokumen	Rp	33.075.000			1 dokumen	Rp	36.382.500
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan</b>		100%	Rp	39.196.000			100%	Rp	43.115.600
		<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>		100%	Rp	39.196.000			100%	Rp	43.115.600

			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	Rp 39.196.000			1 Dokumen	Rp 43.115.600
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp -			1 Dokumen	Rp -
			<b>Kelurahan Tonja</b>							
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 552.045.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.320.229.504</b>
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 196.198.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 215.817.800</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 6.815.000			1 paket	Rp 7.496.500
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 147.138.000			1 paket	Rp 161.851.800
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 21.547.000			1 paket	Rp 23.701.700
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 17.002.000			1 paket	Rp 18.702.200
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 3.696.000			1 dokumen	Rp 4.065.600
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 149.050.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 163.955.000</b>
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	Rp 149.050.000			1 unit	Rp 163.955.000
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 969.945.640</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.066.940.204</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 121.800.000			1 laporan	Rp 133.980.000

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp -			1 laporan	Rp -
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 848.145.640			1 laporan	Rp 932.960.204
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 128.357.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 141.192.700</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	Rp 78.182.000			7 unit	Rp 86.000.200
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp 50.175.000			20 unit	Rp 55.192.500
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.220.060.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.342.066.000</b>
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.220.060.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.342.066.000</b>
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.485.000			1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.633.500
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 unit	Rp 460.000.000			1 unit	Rp 506.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 Pokmas/Ormas	Rp 758.575.000			1 Pokmas/Ormas	Rp 834.432.500
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 218.404.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 240.244.400</b>
		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 218.404.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 240.244.400</b>
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 218.404.000			1 laporan	Rp 240.244.400

Kelurahan Ubung										
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.162.724.064</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.278.996.470</b>	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 146.503.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 161.153.300</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 3.589.000			1 paket	Rp 3.947.900	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 101.156.000			1 paket	Rp 111.271.600	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 23.271.000			1 paket	Rp 25.598.100	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 14.791.000			1 paket	Rp 16.270.100	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 3.696.000			1 dokumen	Rp 4.065.600	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>1 unit</b>	<b>Rp 117.657.000</b>			<b>1 unit</b>	<b>Rp 129.422.700</b>	
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 117.657.000			100%	Rp 129.422.700	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>Rp 716.240.064</b>			<b>1 laporan</b>	<b>Rp 787.864.070</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 39.600.000			1 laporan	Rp 43.560.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp -			1 laporan	Rp -	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 676.640.064			1 laporan	Rp 744.304.070	

		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 182.324.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 200.556.400</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	Rp 105.430.000			1 unit	Rp 115.973.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1 unit	Rp 76.894.000			1 unit	Rp 84.583.400
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.066.654.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.173.319.400</b>
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.066.654.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.173.319.400</b>
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.290.000			1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.419.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20 unit	Rp 593.789.000			20 unit	Rp 653.167.900
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 Pokmas/Ormas	Rp 471.575.000			4 Pokmas/Ormas	Rp 518.732.500
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 244.392.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 268.831.200</b>
		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 244.392.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 268.831.200</b>
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 244.392.000			1 laporan	Rp 268.831.200

<b>Kelurahan Peguyangan</b>										
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.660.379.448</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.826.417.393</b>	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 363.032.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 399.335.200</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 6.530.000			1 paket	Rp 7.183.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 262.815.000			1 paket	Rp 289.096.500	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 36.154.000			1 paket	Rp 39.769.400	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 53.837.000			1 paket	Rp 59.220.700	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 3.696.000			1 dokumen	Rp 4.065.600	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 90.550.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 99.605.000</b>	
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	Rp 90.550.000			1 unit	Rp 99.605.000	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.105.314.448</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.215.845.893</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 71.400.000			1 laporan	Rp 78.540.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp -			1 laporan	Rp -	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 1.033.914.448			1 laporan	Rp 1.137.305.893	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 101.483.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 111.631.300</b>	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 unit	Rp 71.273.000			16 unit	Rp 78.400.300
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp 30.210.000			20 unit	Rp 33.231.000
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.630.764.500</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.793.840.950</b>
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.630.764.500</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1.793.840.950</b>
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.975.000			1 lembaga kemasyarakatan	Rp 2.172.500
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Rp 425.000.000			1 unit	Rp 467.500.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 Pokmas/Ormas	Rp 1.203.789.500			1 Pokmas/Ormas	Rp 1.324.168.450
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 201.166.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 221.282.600</b>
		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 201.166.000</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 221.282.600</b>
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 201.166.000			1 laporan	Rp 221.282.600

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara tahun 2026 selain sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Denpasar Utara. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	6	7
	Camat			
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 17.943.034.136</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 15.989.895.400</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 orang/bulan	Rp 15.989.895.400
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 315.757.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 10.734.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 231.090.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 25.188.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 41.353.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp 7.392.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 179.903.000</b>
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 laporan	Rp 179.903.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.013.088.736</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 248.400.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Rp -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 764.688.736
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 444.390.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 unit	Rp 250.014.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	10 unit	Rp 194.376.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>93,20</b>	<b>Rp 446.864.000</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 417.774.000</b>

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 laporan	Rp	207.843.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dokumen	Rp	209.931.000
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>93,20</b>	<b>Rp</b>	<b>29.090.000</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 dokumen	Rp	29.090.000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>45.308.000</b>
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>45.308.000</b>
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp	45.308.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>205.694.000</b>
<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>205.694.000</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	Rp	172.619.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	Rp	33.075.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>39.196.000</b>
<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>39.196.000</b>
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	Rp	39.196.000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp	-
<b>Kelurahan Tonja</b>				
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>552.045.000</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>196.198.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp	6.815.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp	147.138.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp	21.547.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp	17.002.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp	3.696.000

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 149.050.000</b>
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	Rp 149.050.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 969.945.640</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 121.800.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 848.145.640
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 128.357.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	Rp 78.182.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp 50.175.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.220.060.000</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.220.060.000</b>
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.485.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 unit	Rp 460.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 Pokmas/Ormas	Rp 758.575.000
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 218.404.000</b>
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 218.404.000</b>
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 218.404.000
	<b>Kelurahan Ubung</b>			
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.162.724.064</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 146.503.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 3.589.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 101.156.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 23.271.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 14.791.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 3.696.000

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>1 unit</b>	<b>Rp 117.657.000</b>
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 117.657.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 laporan</b>	<b>Rp 716.240.064</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	Rp 39.600.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	Rp -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	Rp 676.640.064
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 182.324.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	Rp 105.430.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1 unit	Rp 76.894.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.066.654.000</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.066.654.000</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.290.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20 unit	Rp 593.789.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 Pokmas/Ormas	Rp 471.575.000
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 244.392.000</b>
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 244.392.000</b>
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 244.392.000
	<b>Kelurahan Peguyangan</b>			
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.660.379.448</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 363.032.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 6.530.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 262.815.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 36.154.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 53.837.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 3.696.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 90.550.000</b>
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	Rp 90.550.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.105.314.448</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 71.400.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp	1.033.914.448
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>101.483.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 unit	Rp	71.273.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp	30.210.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>1.630.764.500</b>
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>1.630.764.500</b>
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp	1.975.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Rp	425.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 Pokmas/Ormas	Rp	1.203.789.500
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>201.166.000</b>
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>201.166.000</b>
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp	201.166.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota

➤ Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah :

**“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”** merupakan sinergitas dengan visi **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”** dengan pola pembangunan semesta berencana guna mewujudkan kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju dengan konsep **“*Vasudhaiva Kutumbakam*”** (Menyama Braya),

➤ Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 yang memuat kebijakan program/kegiatan dan pendanaan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Denpasar Utara. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Denpasar Utara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 serta diselaraskan dengan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
  - b. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk menyusun Rancangan Awal Renja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026 dengan berpedoman RKPD Kota Denpasar Tahun 2024;
  - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rancangan Awal Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026.

Disamping itu Renja Kecamatan Denpasar Utara juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Denpasar Utara serta memberikan manfaat bagi Proses Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar.